



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**



DINAS SOSIAL



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS SOSIAL**

Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran PEMDA Kereng Humbang Telp. (0536)

4043580

KASONGAN

2025

Kata Pengantar

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024 adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Sosial Kabupaten Katingan untuk mewujudkan *Good governance*, berlandaskan pada *UU No.28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Perwujudan *Good governance* ini diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Katingan dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Katingan selaku unsur pelaksana urusan Sosial di Kabupaten Katingan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian

Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, istilah pelaporannya dari semula Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Ikhtisar Eksekutif

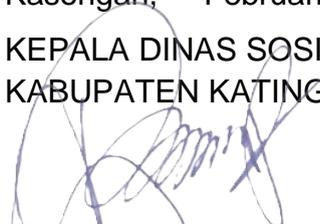
Sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Sosial Kabupaten Katingan telah menyusun Rencana Strategis tahun 2024-2026 dan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pada Laporan Kinerja tahun 2024 ini penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Katingan atas pelaksanaan Rencana Kinerja 2024 menunjukkan bahwa secara keseluruhan dalam tahun 2024 atas 3 (Tiga) sasaran kinerja yang harus dipertanggung jawabkan, dengan seluruh sasaran berhasil dicapai.

Pencapaian sasaran tersebut merupakan komitmen dari seluruh komponen Dinas Sosial Kabupaten Katingan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Katingan. Untuk sasaran-sasaran yang belum dapat dicapai dengan baik hendaknya dapat lebih memacu untuk bekerja lebih baik, lebih giat dan lebih efisien serta lebih efektif.

Kasongan, Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KATINGAN


dr. Robertus Pamuryanto, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681119 200003 1 003

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR.....	VI
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.2. TUGAS DAN FUNGSI.....	3
1.3. ISU-ISU STRATEGIS	3
1.4. KEADAAN PEGAWAI	4
1.5. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA	7
1.6. KEUANGAN	9
1.7. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.....	10
BAB 2 PENDAHULUAN & PERJANJIAN KINERJA	13
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS	13
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah	14
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	14
2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan.....	15
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	16
2.3. RENCANA ANGGARAN PERUBAHAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024.....	17
2.3.1. Target Belanja Dinas Sosial Kabupaten Katingan	17
2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	17
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.....	19
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	20
3.2.1. Meningkatnya Cakupan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanankesejahteraan Sosial (PPKS).....	20
3.2.2. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Penanganan Bencana	23
3.2.3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial.....	23
3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	24
3.2.5. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Renstra	25
3.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024 dengan Capaian Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya.	26
3.2.7. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang Dilakukan.....	27
3.2.8. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Khusus setiap sasaran, Indikator Sasaran dan Program).....	28
3.2.9. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (Khusus setiap sasaran, Indikator Sasaran dan Program)	29
3.3. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024.....	31
BAB 4 PENUTUP	38
4.1. KESIMPULAN	38
4.2. RENCANA TINDAK LANJUT	38
LAMPIRAN.....	40

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	4
Tabel 1. 2 Jumlah PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	4
Tabel 1. 3 Jumlah PHL Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1. 4 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan.....	5
Tabel 1. 5 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan	6
Tabel 1. 6 Jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja*	6
Tabel 1. 7 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	7
Tabel 1. 8 Ringkasan Anggaran Tahun 2024.....	9
Tabel 1. 9 Rincian Anggaran Tahun 2024	9
Tabel 2. 1 Ringkasan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Katingan 2024-2026.....	14
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Katingan.....	15
Tabel 2. 3 Strategi, Program dan Kegiatan	15
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
Tabel 2. 5 Target Belanja APBD-P Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024.....	17
Tabel 2. 6 Anggaran per Sasaran Strategis.....	18
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	20
Tabel 3. 3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3. 4 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan	29
Tabel 3. 5 Data Anggaran dan Realisasi DPPA Dinas Sosial Kabupaten Katingan	32

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Katingan..... 2



BAB 1

PENDAHULUAN

Bab 1 Berisi:

- 1. Struktur Organisasi*
- 2. Fungsi dan Tugas*
- 3. Isu Strategis*
- 4. Keadaan Pegawai*
- 5. Keadaan Sarana dan Prasarana*
- 6. Keuangan*
- 7. Sistematika Laporan*

Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dinas Sosial Kabupaten Katingan menyusun Laporan kinerja Tahun 2024 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024 berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Peraturan Bupati Katingan Nomer 21 Tahun 2023 tentang Penerapan Sstem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Petunjuk Teknis Pengukuran, Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Katingan;
2. Mendorong Dinas Sosial Kabupaten Katingan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

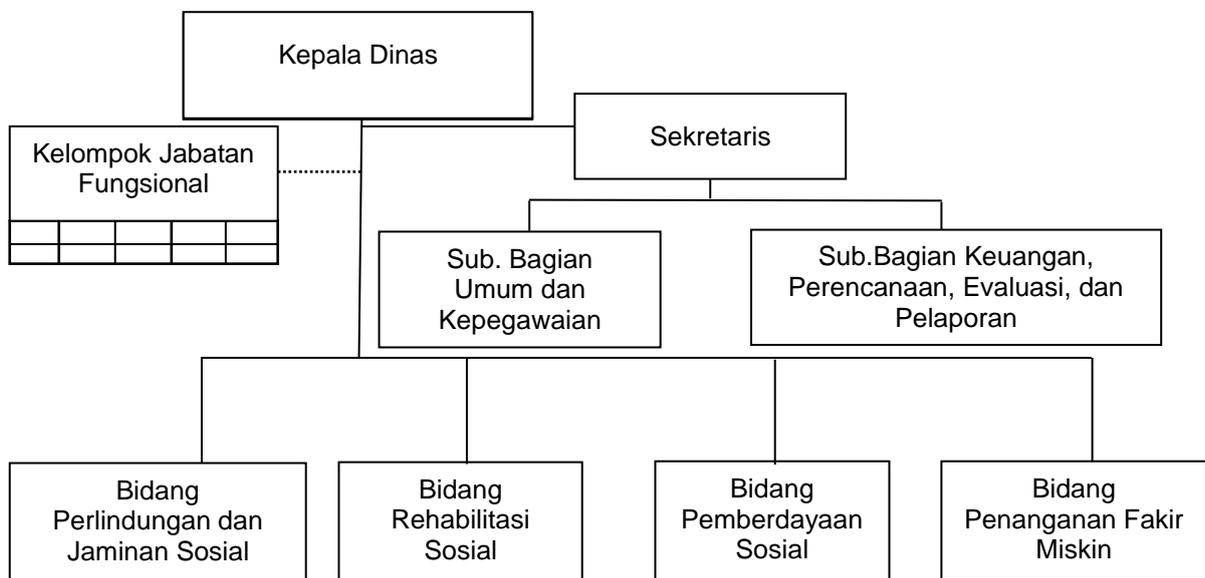
kepada publik;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kabupaten Katingan untuk meningkatkan kinerja;
4. Memberikan kepercayaan kepada publik terhadap Dinas Sosial Kabupaten Katingan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

Dinas/Badan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Katingan



1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2022 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan fungsi Koordinasi kegiatan, Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa, Pelaksanaan fungsi lain.

1.3. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Dengan mengetahui isu strategis, Perangkat Daerah dapat menganalisis bagian tertentu yang harus dimaksimalkan secara optimal, penerapan strategi yang relevan serta menentukan arah pengembangan organisasi. Pengidentifikasian isu- isu strategis juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD belum optimal
2. Administrasi Keuangan belum maksimal
3. Administrasi Kepegawaian belum dilakukan dengan baik
4. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan aparatur masih belum memadai
5. Pemberdayaan FM, KAT dan PPKS belum dilakukan dengan maksimal
6. Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial masih terbatas
7. Kualitas dan jangkauan penanggulangan bencana, perlindungan dan jaminan sosial masih belum maksimal

1.4. Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Katingan per 30 Desember 2024 sebanyak 75 orang terdiri dari 17 Orang PNS, 2 Orang PPPK, 18 Orang PHL, 14 Orang Taruna Siaga Bencana, 10 Orang PKH dan 14 Orang TKS dan TKSK dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1. 1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SMP/Sederajat	-	-	-
3.	SMA/Sederajat	-	1	1
4.	D3	-	-	-
5.	D4	-	1	1
6.	S1	8	5	13
7.	S2	1	1	2
Jumlah				17 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

Tabel 1. 2 Jumlah PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SMP/Sederajat	-	-	-
3.	SMA/Sederajat	-	-	-
4.	D3	-	-	-
5.	D4	-	-	-
6.	S1	-	2	2
7.	S2	-	-	-
Jumlah				2 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

Tabel 1. 3 Jumlah PHL Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SMP/Sederajat	-	-	-
3.	SMA/Sederajat	4	6	10
4.	D3	-	-	-
5.	D4	-	-	-
6.	S1	2	6	8
7.	S2	-	-	-
Jumlah				18 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1. 4 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	2	-	2
2.	Golongan III	7	7	14
3.	Golongan II	-	1	1
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah PNS				17 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

c. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1. 5 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kepala Bidang	3	1	4
6.	Kepala Sub Bagian	1	1	2
7.	Jabatan Fungsional Tertentu	4	5	9
8.	Jabatan Fungsional Umum	-	3	3
Jumlah				20

(Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2024)

d. Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja*

Tabel 1. 6 Jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja*

No.	Bidang	Kebutuhan Pegawai Sesuai Beban Kerja	Bezetting	Selisih
1.	Kepala Dinas	1 orang	1 orang	-
2.	Sekretaris	1 orang	1 orang	-
3.	Sekretariat	26 orang	7 orang	19 orang
4.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11 orang	3 orang	9 orang
5.	Bidang Rehabilitasi Sosial	12 orang	2 orang	10 orang
6.	Bidang Pemberdayaan Sosial	10 orang	3 orang	9 orang
7.	Bidang Penanganan Fakir Miskin	13 orang	2 orang	11 orang
Jumlah		74 orang	19 orang	58 orang

(Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2024)

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel 1. 7 Keadaan Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
1	Alat-alat berat:				
	Mesin pompa air	2 unit	Baik	3 unit	
2	Alat Angkutan:				
	a. Roda 4	4 unit	Baik	5 unit	
	b. Roda 2	6 unit	Baik	20 unit	
3	Alat-alat kantor dan rumah tangga:				
	1) Mesin ketik	4 unit	4 Kurang Baik	4 unit	
	2) Lemari Penyimpanan	1 Unit	Baik	1 unit	
	3) Lemari Besi	6 unit	Baik	6 unit	
	4) Lemari Kayu	5 unit	Baik	5 unit	
	5) Rak besi	3 unit	Baik	3 unit	
	6) Filling cabinet	19 unit	Baik	19 unit	
	7) Brandkas	1 unit	Baik	1 unit	
	8) CCTV	1 unit	Baik	1 unit	
	9) Meja Kerja Kayu	1 unit	Baik	1 unit	
	10) Kursi Besi/Metal	7 unit	Baik	7 unit	
	11) Meja Rapat	6 unit	Baik	6 unit	
	12) Meja Telepon	2 unit	Baik	2 unit	
	13) Meja Resepsionis	1 unit	Baik	1 unit	
	14) Meja Kerja ½ Biro	5 unit	Baik	5 unit	
	15) Kasur/Spring bed	7 unit	Baik	7 unit	
	16) Meja Makan Kayu	1 unit	Baik	1 unit	
	17) Kursi Tamu	2 unit	Baik	2 unit	
	18) Kursi Putar	4 unit	Baik	4 unit	
	19) Kursi Lipat	17 unit	Baik	17 unit	
	20) Meja Komputer	5 unit	Baik	5 unit	
	21) Sofa	3 unit	Baik	5 unit	
	22) Vacum Cleaner	1 unit	Baik	1 unit	
	23) Mesin Pemetong Rumput	6 unit	2 Rusak	2 unit	
	24) Wastafel	3 set	Baik	2 set	
	25) Lemari Es	6 unit	Baik	6 unit	
	26) AC	25 unit	8 Rusak	17 unit	
	27) Portable AC	2 unit	Baik	2 unit	
	28) Kipas Angin	8 unit	Baik	8 unit	
	29) k o m p o r g a s	2 Set	Baik	2 Set	
	30) Rice Cooker	1 unit	1 Rusak	1 unit	
	31) Rak Piring	1 unit	Baik	1 unit	
32) Televisi	4 unit	1 Rusak	1 unit		

	33) Wireles	1 unit	Baik	1 unit
	34) Microphone Floor Stand	1 unit	Baik	1 unit
	35) Camera Video	1 unit	Baik	1 unit
	36) Dispenser	4 unit	Baik	4 unit
	37) Tangki Air	1 unit	Baik	1 unit
	38) Alat Pembantu Kebakaran	1 unit	Baik	1 unit
	39) Meja Kerja	22 unit	Baik	3 unit
	40) Kursi Kerja	41 unit	Baik	41 unit
	41) Lemari Arsip Pejabat	18 unit	Baik	18 unit
	42) Audio Mixing Console	2 unit	Baik	2 unit
	43) Microphone Wireless	2 unit	Baik	2 unit
	44) Microphone Cable	2 unit	Baik	2 unit
	45) Camera Electronic	1 unit	Baik	4 unit
	46) Tripod Camera	1 unit	Baik	1 unit
	47) Generator	1 unit	Baik	1 unit
	48) Personal Computer	7 unit	1 Kurang Baik	1 unit
	49) PC Unit	2 Unit	Baik	2 Unit
	50) Laptop	18 unit	Baik	18 unit
	51) Note Book	4 unit	Baik	4 unit
	52) Hard Disk	11 unit	Baik	11 unit
	53) Printer	22 unit	2 Rusak	2 unit
	54) Scanner	1 unit	Baik	1 unit
	55) Tenda	5 unit	Baik	5 unit
	56) Air Conditioning	3 Unit	Baik	2 set
	57) Gambar presiden	1 set	Baik	1 set
4	Gedung dan Bangunan:			
	1) Gedung Dinas Sosial	1 unit	Baik	1 unit
	2) Gedung Rumah Singgah	1 unit	Baik	1 unit
	3) Gedung Ruang Rapat	1 unit	Baik	1 unit
	4) Bangunan Pendopo Area Pemakaman	1 unit	Baik	1 unit
	5) Pagar dan Papan Nama Kantor	1 unit	Baik	1 unit
5	Tanah:			
	1) Tanah Kantor Dinas Sosial	10.000 M2	Baik	-
	2) TPU Taman Makam Pahlawan	24.500 M2	Baik	-

(Sumber data : Kartu Inventaris Barang Dinas Sosial Kabupaten Katingan, Desember 2024)

1.6. Keuangan

Dukungan pendanaan untuk melaksanakan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Katingan pada tahun 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp. 8.863.001.200, dan pada bulan 2024 disusunlah APBD Perubahan (APBD-P) 2024 sebagai upaya penyesuaian-penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Subkegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Katingan karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan sebesar Rp. 8.863.001.200. Ringkasan APBD dan APBD-P 2024 pada Dinas/Badan di tunjukan pada Tabel 1.6, sebagai berikut:

Tabel 1. 8 Ringkasan Anggaran Tahun 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Belanja Daerah	Rp. 8.863.001.200	
Belanja Operasi	Rp. 7.860.674.843	Rp. 8.560.609.843
Belanja Pegawai	Rp. 3.818.967.764	Rp. 3.818.967.764
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.993.707.079	Rp. 4.143.642.079
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 48.000.000	Rp. 598.000.000
Belanja Modal	Rp. 1.002.326.357	Rp. 1.002.326.357
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 133.140.891	Rp. 133.140.891
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 869.185.466	Rp. 869.185.466
Jumlah	Rp. 8.863.001.200	Rp. 9.562.936.200

(Sumber: DPA Pergeseran 6 Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024)

Rincian program dan kegiatan dari APBD dan APBD-P Tahun 2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Katingan ditunjukkan pada Tabel 1.7.

Tabel 1. 9 Rincian Anggaran Tahun 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp6.258.434.606	Rp6.258.434.606
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp66.928.931	Rp66.928.931
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.853.139.764	Rp3.853.139.764
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp160.240.000	Rp185.019.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp541.351.517	Rp576.441.517
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp16.792.333	Rp16.792.333
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp456.759.500	Rp358.435.500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.163.222.561	Rp1.201.677.561
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp496.612.763	Rp496.612.763

Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Rp99.194.250	Rp99.194.250
Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.498.000	Rp4.498.000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp392.920.513	Rp392.920.513
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp1.262.754.110	Rp1.262.754.110
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp661.600.435	Rp661.600.435
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Rp601.153.675	Rp601.153.675
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp299.990.610	Rp999.925.610
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp299.990.610	Rp999.925.610
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp500.210.000	Rp500.210.000
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp396.810.000	Rp396.810.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp103.400.000	Rp103.400.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp44.999.111	Rp44.999.111
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp44.999.111	Rp44.999.111

(Sumber: DPA Pergeseran 6 Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024)

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas/Badan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini berisi tujuan penyusunan Laporan Kinerja;
2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan realisasi keuangan;
3. Sasaran strategis dan program Kegiatan Tahun 2024.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang Penjelasan Umum Perangkat Daerah Dinas/Badan yang terdiri dari Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi, isu strategis, keadaan Sumber Daya (keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana, keuangan) dan sistematika penulisan Laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Perencanaan

Strategis Tujuan dan Sasaran Dinas/Badan, Strategi, Program dan Kegiatan, Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan tentang capaian kinerja Dinas/Badan antara lain: Capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau yang sejenis, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dukungan inovasi dalam pencapaian kinerja, kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja dan peran OPD dalam pencapaian sasaran, dan Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi, rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerjanya dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

Pada bagian ini disajikan bagan struktur organisasi, cascading/pohon kinerja, perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja, pengukuran

kinerja, matriks tindaklanjut LHE SAKIP tahun 2023, foto-foto penghargaan yang diperoleh (jika ada).



BAB 2

PENDAHULUAN & PERJANJIAN KINERJA

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Tujuan dan Sasaran*
3. *Strategi*
4. *Program dan Kegiatan*
5. *Perjanjian Kinerja*
6. *Rencana Anggaran*
7. *Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis*

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan yang baik berdampak pada keberhasilan kinerja Perangkat Daerah, oleh karenanya perlu adanya perencanaan strategis yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan Strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPD Kabupaten Katingan 2024-2026. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPD Kabupaten Katingan 2024- 2026 sebagai berikut,

Tabel 2. 1 Ringkasan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Katingan 2024-2026

Tujuan	Sasaran Daerah
Memperkuat struktur ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan
Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing
Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
Terwujudnya kondisifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan).	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal.
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

(Sumber: RPD Kabupaten Katingan 2024-2026)

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Katingan mendukung pada pencapaian Tujuan yakni Meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing dan Sasaran Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Katingan selama 3 tahun anggaran adalah Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Sosial telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 3 tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Katingan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang dibantu dan diberdayakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	% (Persen)	82,1	83,8	85,5
	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang dibantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar	% (Persen)	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Katingan	Grade	B	B	A

(Sumber: Renstra Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024 -2026)

2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target kinerja di Tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Katingan didukung oleh 6 program dan 16 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Strategi, Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<p>Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</p>	<p>a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</p> <p>b. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>d. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p>e. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial</p> <p>f. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>g. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional</p>
2	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Penanganan Bencana	1. Program Penanganan Bencana	a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

			b. Penyelenggaraan Pembedayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(Sumber: Renstra Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024 - 2026)

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang dibantu dan diberdayakan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	2024 : 82,1 2025: 83,8 2026: 85,5
2	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang dibantu dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	2024: 100 2025: 100 2026: 100
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Katingan	Nilai (Predikat)	2024: B 2025: B 2026: A

(Sumber: Renstra Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024 - 2026)

2.3. Rencana Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024

Dinas Sosial melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 8.863.001.200,- dalam dinamika pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perubahan kebijakan dari instansi vertikal dan kebijakan Kepala Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian penganggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui mekanisme APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Katingan mengalami perubahan menjadi Rp. 9.562.936.200,-.

2.3.1. Target Belanja Dinas Sosial Kabupaten Katingan

Target belanja merupakan angka (jumlah) belanja yang direncanakan dan harus tercapai. Target belanja Dinas Sosial Kabupaten Katingan di tunjukan pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Target Belanja APBD-P Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024

Uraian	Target (Rp)	Persentase Realisasi
Belanja Operasi	8.560.609.843	80,72%
- Belanja Pegawai	3.818.967.764	
- Belanja Barang dan Jasa	4.143.642.079	
Belanja Modal	1.002.326.357	94,53%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.140.891	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	869.185.466	
Jumlah	9.562.936.200	

(Sumber: DPA Pergeseran 6 Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024)

Berdasarkan data tabel 2.5 belanja operasi Dinas Sosial Kabupaten Katingan sebesar 80,72% dan belanja modal 94,53%

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Katingan, dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut .

Tabel 2. 6 Anggaran per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran Perubahan (Rp)	%	Keterangan
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2.804.291.594	29,44%	
2	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Penanganan Bencana	473.210.000	4,97%	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial	6.249.434.606	65,59%	

(Sumber: DPA Pergeseran 6 Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024)



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

- Bab 3 Berisi :**
1. *Capaian Kinerja Tahun 2024*
 2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
 3. *Realisasi Anggaran*

Dinas Sosial Kabupaten Katingan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Katingan tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Katingan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran. strategis Dinas Sosial Kabupaten Katingan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Kesejahteraan Sosial	%	82,1	85,88	104,65
2	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang dibantu dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Katingan	Nilai (Predikat)	B	A	107,75%

Pada tahun 2024, indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Kesejahteraan Sosial tercapai sebesar 104,65%, Indikator Persentase Korban Bencana yang dibantu dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar tercapai sebesar 100% dan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Katingan tercapai sebesar 107,75%.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Katingan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Meningkatkan Cakupan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Untuk mencapai sasaran ini dilakukan dengan program dan kegiatan

sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan :
 - a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan pagu Rp. 99.194.250,-
 - b. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp4.498.000,-
 - c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 392.920.513,-
2. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan :
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan pagu Rp. 661.600.435,-
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial dengan Pagu Rp. 601.153.675,-
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 999.925.610,-
4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan kegiatan :
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan pagu Rp.44.999.111,-

Indikator sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan rincian target dan realisasi nya sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Kesejahteraan Sosial	%	82,1	85,88	%	Indikator dan target berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2024 - 2026
Capaian sasaran				104,65%	

Sasaran ini dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil, hal ini terlihat dari capaian rata-rata kinerja sasaran ini sebesar 104,65%, Untuk Tahun 2024 total target PPKS yang ada seharusnya dilayani sebanyak 44.080 KPM, jumlah PPKS yang sudah diberdayakan dan dibantu melalui Dinas Sosial sebanyak 37.856 KPM, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PPKS yang mendapat Bantuan Sosial Pangan dan juga Mendapat Program Keluarga Harapan sebanyak 14.342 KPM.
2. Jumlah Penerima BLT DBHDR sebanyak 5.041 KPM.
3. Jumlah PPKS yang diberdayakan melalui pelatihan peningkatan Keterampilan sebanyak 20 KPM.
4. Jumlah Lansia yang mendapat paket sandang (Family Kit) pelayanan Rehabilitasi Sosial Sebanyak 22 KPM
5. Jumlah PPKS yang mendapat bantuan permakanan sebanyak 163 KPM.
6. Jumlah PPKS yang mendapat bantuan sandang (Family Kit) sebanyak 130 KPM.
7. Jumlah PPKS yang mendapat alat bantu sebanyak 47 KPM.
8. Penerima Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi Tahun 2024 Sebanyak 1.064 KPM melalui sumber dana APBD Perubahan Dinas Sosial.
9. Penerima PBI JKN-KIS sebanyak 17.027 KPM.

Sasaran ini dapat tercapai melebihi dari target yang direncanakan yaitu 82,1 % realisasi 85,55% dikarenakan pada pertengahan tahun Anggaran Dinas Sosial mendapat tambahan pagu anggaran untuk penanganan dampak inflasi bagi 1.064 KPM di 7 (tujuh) kelurahan.

3.2.2. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Penanganan Bencana

Untuk mencapai sasaran ini dilakukan dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penanganan Bencana dengan kegiatan :
 - b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan pagu Rp. 369.810.000,-
 - c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan pagu Rp. 103.400.000,-

Sasaran ini dicapai dengan 1 (satu) indikator dengan target dan capaian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Ketetapan
<i>Persentase Korban Bencana yang dibantu dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar</i>	100%	100%	100%	Indikator dan target berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2024 - 2026
Capaian sasaran			100%	

Pada tahun 2024 terdapat 125 KPM korban bencana yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dari Dinas Sosial Kabupaten Katingan, sebagai perbandingan.

3.2.3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial

Untuk mencapai sasaran ini dalam tahun 2024 dilakukan dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 66.928.931,-
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 3.853.139.764,-
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 185.019.000,-

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 576.441.517,-
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 16.792.333,-
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu Rp. 358.435.500,-
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu Rp. 1.201.677.561,-

Sasaran ini dicapai dengan 1 (satu) indikator dengan target dan capaian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keterangan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Katingan	B (86)	A (91,59)	107,75	Indikator dan target berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2024 - 2026
Capaian sasaran			107,75	

Sasaran ini dicapai dengan sangat baik dengan tingkat capaian melebihi target sebesar 107,75%. Hasil ini didapat berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan Dinas Sosial dalam kurun waktu Januari 2024 s/d Desember 2024 dari total 190 koresponden sebanyak 190 Koresponden menyatakan sangat puas dengan layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Katingan.

3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tingkat capaian sasaran yang di ukur dari indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	2022			2023		2024		
	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Realisasi	% tingkat capaian	Target	Realisasi	% tingkat capaian
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Kesejahteraan Sosial	76,96	81,30	105,63	82,96	102,66	82,1	85,88	104,65

Tingkat capaian sasaran yang di ukur dari indikator Persentase Korban Bencana yang dibantu dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	2022			2023		2024		
	Target	Realisasi	%	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
			tingkat capaian		tingkat capaian			tingkat capaian
Persentase Korban Bencana yang dibantu dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	85	100	100	100	100	100	100	100

Tingkat capaian sasaran yang di ukur dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	2022			2023		2024		
	Target	Realisasi	%	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
			tingkat capaian		tingkat capaian			tingkat capaian
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Kesejahteraan Sosial	B	B	100	B (84,43)	100	B	A	107,75
	-81	(81,5)				-86	(91,59)	

3.2.2. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Renstra

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 5 tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada tabel dibawah ini dan tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis.

Tahun	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
2022	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial	%	76,96	81,30	105,63%	
2023	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial	%	80,81	82,96	102,66%	

Meningkatnya Cakupan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Penanganan Bencana

Tahun	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2022	Persentase Korban Bencana yang dibantu dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	85	100	100%	Indikator dan target berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2024 - 2026
2023	Persentase Korban Bencana yang dibantu dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	90	100	100%	

Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial

Tahun	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2022	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Katingan	Predikat Nilai	B (81)	B (81,5)	100%	Indikator dan target berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2024 - 2026
2023	Persentase Korban Bencana yang dibantu dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Predikat Nilai	B (84)	B (84,43)	100%	

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2024 dengan Capaian Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya.

Dinas Sosial Kabupaten Katingan merupakan salah satu Instansi Pemerintah Daerah yang berperan serta dalam pencapaian sasaran kinerja daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 yaitu sasaran poin 2.1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing dengan Indikator Persentase Penduduk Miskin dengan target pada Tahun 2024 sebesar 4,95%

Persentase penduduk miskin Kabupaten Katingan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi, pada tahun 2022 persentase penduduk miskin Kabupaten Katingan ada di angka 5,50% kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 4,99% namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi **5,26%**, ini lebih tinggi dari target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan sebesar **4,95%** kenaikan ini disebabkan beberapa faktor diantaranya kenaikan harga bahan pokok serta lesunya pertumbuhan ekonomi daerah ataupun nasional.

Berikut perbandingan (bench mark) capaian kinerja indikator kemiskinan Kabupaten Katingan dengan capaian kinerja Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya :

Tahun	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				Keterangan
			Kab Katingan	Nasional	Provinsi	Kota P.Raya	
2024	Persentase Penduduk miskin	%	5,26	8,57	5,17	3,52	Sumber : BPS
2023	Persentase Penduduk miskin	%	4,99	9,36	5,37	3,44	
2022	Persentase Penduduk miskin	%	5,50	9,57	7,07	3,61	

3.2.4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang Dilakukan

Beberapa faktor masih menghambat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Katingan, diantaranya :

1. Ketimpangan Ekonomi, Pertumbuhan ekonomi seringkali tidak merata, dengan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin masih tinggi.
2. Ketergantungan kerja pada Sektor Informal, banyak masyarakat Kabupaten Katingan bekerja di sektor informal dengan upah tak menentu dan tanpa jaminan sosial.
3. Inflasi tahun 2024, terjadinya kenaikan beberapa harga barang kebutuhan pokok
4. Untuk mengatasi tantangan di atas, beberapa solusi yang dapat diimplementasikan Dinas Sosial adalah :
5. Memperluas jangkauan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat melalui penambahan anggaran BLT (Bantuan Langsung Tunai).
6. Memperbaiki sistem bantuan sosial dengan cara memastikan bantuan sosial tepat sasaran dengan menggunakan data yang akurat dan sistem distribusi yang transparan.

3.2.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Khusus setiap sasaran, Indikator Sasaran dan Program)

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program atau kegiatan teknis dalam pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Program	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
1.	Meningkatnya Cakupan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan dalam peningkatan ksesjahteraan sosial	93%	92,41%	99,36%
		Cakupan TMP yang terpelihara	100%	98,61%	98,61%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat penanganan/layanan pemenuhan kebutuhan dasar	100%	77,87%	77,87%
		Cakupan pemutakhiran / pemenuhan data terpadu penanggulangan kemiskinan	82%	98,72%	120%
2.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	95,34%	95,72%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial	Nilai Lakip Dinas Sosial	B	78,41%	78,41%

3.2.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (Khusus setiap sasaran, Indikator Sasaran dan Program)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 3. 4 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

No	Sasaran Renstra	Indikator Program	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial	70%	93%	100%	92,41%
		Cakupan TMP yang terpelihara	70%	70%	100%	98,67%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat penanganan/layanan pemenuhan kebutuhan dasar	80%	80%	100%	77,87%
		Cakupan pemutakhiran/ pemenuhan data terpadu penanggulangan kemiskinan	82%	82%	100%	98,72%
2	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	95.34%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial	Nilai Lakip Dinas Sosial	B		100%	78,1%

Dari Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Katingan 2024 pada indikator program eksternal 100%, dan realisasi kinerja di atas target dari reuiu Renstra 2024.

Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja dan Peran OPD dalam Pencapaian Sasaran. Kolaborasi

lintas sektor merupakan salah satu kunci penting dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Sosial, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai sasaran pembangunan sosial. Dinas Sosial melaksanakan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung capaian kinerja instansi yakni kolaborasi pada sektor sosial, sektor fisik, sektor ekonomi, sekretariat daerah dan kemantren seperti: kolaborasi dengan bagian organisasi untuk kebijakan strategis, inspektorat untuk pengawasan internal, bagian kerjasama terkait kerjasama daerah, dan Bersama instansi di Pemerintah Kabupaten Katingan.

Kolaborasi lintas sektor melibatkan kerja sama antara Dinas Sosial dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari instansi pemerintah, swasta, lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat. Beberapa bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan antara lain :

1. Kolaborasi dengan Instansi Pemerintah Lainnya
 - Dinas Kesehatan: Bekerja sama dalam penanganan masalah sosial yang berkaitan dengan kesehatan, seperti bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, atau lanjut usia.
 - Dinas Pendidikan: Membantu dalam program pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau penyandang disabilitas.
 - Dinas Tenaga Kerja: Menyediakan pelatihan keterampilan dan penyaluran tenaga kerja bagi kelompok rentan, seperti mantan narapidana, penyandang disabilitas, atau korban kekerasan.
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A): Bersinergi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta program pemberdayaan perempuan.
2. Kolaborasi dengan Lembaga Non-Pemerintah (NGO) dan Organisasi Masyarakat

- LSM/NGO: Bekerja sama dalam program pemberdayaan masyarakat, penanganan bencana, atau rehabilitasi sosial.
 - Organisasi Keagamaan: Memanfaatkan jaringan organisasi keagamaan untuk pendistribusian bantuan sosial dan program pemberdayaan.
 - Organisasi Kemasyarakatan: Melibatkan masyarakat dalam program sosial, seperti posyandu, karang taruna, atau kelompok swadaya masyarakat.
3. Kolaborasi dengan Sektor Swasta
- CSR (Corporate Social Responsibility): Memanfaatkan dana CSR dari perusahaan untuk program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, atau pembangunan fasilitas sosial.
 - UMKM: Membantu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan usaha kecil.
4. Kolaborasi dengan Masyarakat
- Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sosial.
 - Relawan Sosial: Memanfaatkan relawan untuk membantu dalam penanganan bencana, pendampingan kelompok rentan, atau program sosial lainnya.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Secara keseluruhan Dinas Sosial Kabupaten Katingan menganggarkan pembiayaan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama untuk tahun 2024, yaitu : Belanja Operasi sebesar Rp. 8.560.609.843,- Belanja Modal sebesar Rp. 1.002.326.357,-. Anggaran seluruhnya Dinas Sosial Kabupaten Katingan sebesar Rp9.562.936.200.- dengan realisasi sebesar Rp7.858.024.988.- atau 82,17% dan Realisasi fisik sebesar 86,35 %.

Rincian data anggaran dan realisasi DPPA Dinas Sosial Kabupaten Katingan untuk Tahun Anggaran 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Data Anggaran dan Realisasi DPPA Dinas Sosial Kabupaten Katingan

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE KEUANGAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.258.434.606	4.907.357.007	100	Nilai Lakip	B	B	100 %
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	66.928.931	66.850.400	100	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi disusun Tepat Waktu	85%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	47.662.931	47.377.600	99,48	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Sosial)	3.750.000	3.280.000	87,47	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	15.556.000	15.192.800	97,67	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	3.853.139.764	2.602.530.588	67,54	Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu	80%	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Sosial)	3.818.967.764	2.568.956.958	67,27%	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Sosial)	3.552.000	3.548.000	99,89%	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Sosial)	7.400.000	7.400.000	100%	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Sosial)	5.570.000	5.560.000	99,82%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Laporan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Dinas Sosial)	17.650.000	17.065.600	96,69%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	12 Laporan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	185,260,000	184,660,724	99,68	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	75%	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dinas Sosial)	3.320.000	3.320.000	100	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Dokumen
			Pendidik dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Sosial)	64.699.000	64.620.000	99,98	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Orang
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Sosial)	117.000.000	117.000.000	100	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	654,087,825	647,191,965	98,95	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran	75%	

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Sosial)	7.443.080	7.443.000	100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Sosial)	77.621.091	68.986.125	88,88%	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Sosial)	108.304.474	96.315.500	88,93%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Sosial)	34.993.372	34.993.372	100%	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Sosial)	8.904.500	7.854.000	88,20%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1.363 Dokumen
			Fasilitas Kunjungan Tamu (Dinas Sosial)	4.995.000	4.995.000	100%	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Sosial)	334.180.000	334.180.000	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	65 Laporan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.792.333	13.819.500	82,3%	Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam menunjang pelayanan	68%	
			Pengadaan Mebel (Dinas Sosial)	10.840.302	9.213.000	84,99%	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	5 Unit
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Sosial)	5.952.031	4.606.500	77,39%	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	2 Unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.435.500	333.991.270	93,18%	Persentase ketersediaan jasa penunjang pelayanan kantor	82%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Sosial)	64.999.500	51.491.720	79,22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Sosial)	293.436.000	282.500.000	96,27	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.852.095	285.425.900	95,82	Persentase barang milik daerah kondisi baik	78%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Sosial)	105.589.700	105.225.700	99,66	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Sosial)	8.3452.650	7.6541.100	91,72	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	3 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Sosial)	12.221.100	12.211.100	99,92	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	10 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Sosial)	80.091.000	79.082.000	95,67	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah (Dinas Sosial)	12.497.645	12.366.000	98,95	Luas Tanah Yang Dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitasi	4 Ha
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	253.706.314	185.001.001	92,41	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial	70%	93%	100%

		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	99.149.250	25.680.001	63,32	Jumlah lokasi KAT yang diberdayakan	1 Lokasi	2 Lokasi
			Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT (Dinas Sosial)	25.700.000	25.680.000	99,92	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga
			Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT (Dinas Sosial)	73.494.250	37.133.960	50,53	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	4.498.000	4.490.000	99,82	Jumlah rekomendasi izin sumbangan yang di terbitkan	2 Dokumen	1 Dokumen
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dinas Sosial)	4.498.000	4.490.000	99,82	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	392.920.513	391.631.320	99,67	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	70 PSKS	55 PSKS
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	24.996.988	24.728.000	98,92%	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	24.999.797	24.933.500	99,73%	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	7 Orang
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	42.977.550	42.635.500	99,16%	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	279.926.446	279.640.320	99,83%	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.262.754.110	983.281.000	78	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat penanganan/layanan pemenuhan kebutuhan dasar	80 %		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (Dinas Sosial)	661.600.435	488.373.130	73,82	Jumlah anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan pengemis gelandangan terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya	30 Orang	
			Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial)	62.801.038	50.170.000	79,89	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
			Penyediaan Sandang (Dinas Sosial)	78.601.178	57.221.500	72,79%	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya	25 Orang

							yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Alat Bantu (Dinas Sosial)	36.448.219	32.987.800	90,51%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (Dinas Sosial)	31.000.000	24.271.000	78,29%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Dinas Sosial)	220.000.000	155.986.530	70,90%	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (Dinas Sosial)	10.500.000	1.500.000	14,29%	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak (Dinas Sosial)	5.000.000	2.620.000	52,40%	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Dinas Sosial)	16.000.000	50.000	0,31%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	4
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan (Dinas Sosial)	75.750.000	67.630.000	89,28%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
			Pemberian Layanan Kedaruratan (Dinas Sosial)	25.000.000	11.231.900	44,93%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Dinas Sosial)	35.500.000	31.823.900	89,64%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
			Pemberian Layanan Rujukan (Dinas Sosial)	65.000.000	52.890.500	81,37%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (Dinas Sosial)	601.153.675	494.907.870	82,33	Jumlah PMKS Lainnya mendapatkan pembinaan atau bimbingan	60 Orang	
			Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial)	28.000.000	23.200.100	82,86%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
			Penyediaan Sandang (Dinas Sosial)	28.000.000	14.481.000	51,72%	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
			Penyediaan Alat Bantu (Dinas Sosial)	108.203.675	98.660.000	91,18%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan	20 Orang

			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti (Dinas Sosial)	4.950.000	4.920.000	99,39%	Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Dinas Sosial)	28.000.000	23.188.640	82,82%		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (Dinas Sosial)	14.000.000	6.390.000	45,64%		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak (Dinas Sosial)	5.000.000	-	0%		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Dinas Sosial)	15.000.000	15.000.000	100%		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Dinas Sosial)	42.000.000	11.659.800	27,76%		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (Dinas Sosial)	8.000.000	-	0%		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang
			Pemberian Layanan Rujukan (Dinas Sosial)	35.000.000	27.279.400	77,94%		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	285.000.000	270.128.930	94,78%		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Orang
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	999.925.610	987.130.374	98,72%	Cakupan pemutahiran/pemenuhan data terpadu penanggulangan kemiskinan	82%	82%		100 %
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	999.925.610	987.130.374	98,72%	Jumlah Dokumen dan Jumlah Aplikasi yang dikelola		1 Aplikasi	1 Aplikasi
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	100.000.000	96.155.007	96,16%		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2.500 Orang
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	99.999.721	92.316.867	92,32%		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	3.500 Orang
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Dinas Sosial)	799.925.889	798.658.500	99,84%		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Keluarga
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	500.210.000	476.921.327	95,34%	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%		100 %
		Perlindungan	396.810.000	379.736.327	95,70%	Jumlah		125 Orang	125 Orang

		Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)				Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah bencana		
			Penyediaan Makanan (Dinas Sosial)	110.410.000	106.437.067	96,40%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang
			Penyediaan Sandang (Dinas Sosial)	106.400.000	100.020.000	94,00%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (Dinas Sosial)	65.000.000	59.204.260	91,08%	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (Dinas Sosial)	75.000.000	74.590.000	99,45%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
			Pelayanan Dukungan Psikososial (Dinas Sosial)	40.000.000	39.485.000	98,71%	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	103.400.000	97.185.000	93,99%	Jumlah Tagana yang dikerahkan dalam penanganan bencana	16 Orang	14 Orang
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (Dinas Sosial)	45.000.000	39.155.000	87,01%	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (Dinas Sosial)	58.400.000	58.030.000	99,37%	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	44.999.111	44.400.000	98,67%	Cakupan TMP yang terpelihara	70%	100%	100 %
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	44.999.111	44.400.000	98,67%	Jumlah TMP yang dipelihara	1 TMP	1 TMP
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	20.000.000	19.750.000	98,75%	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dinas Sosial)	24.999.111	24.650.000	98,60%	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam

BAB 4

PENUTUP

Bab 4 Berisi :

- 1. Kesimpulan*
- 2. Rencana Tindak Lanjut*

4.1. Kesimpulan

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Katingan telah berupaya untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan transparan, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Perencanaan Strategis yang didalamnya berisi sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Katingan.

Secara keseluruhan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2024-2026 dalam tahun 2024 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dipertanggung jawabkan Dinas Sosial Kabupaten Katingan. Untuk mengukur keberhasilannya terhadap masing–masing sasaran tersebut ditetapkan indikator-indikator kinerja yang melekat sesuai dengan sasaran strategis. Sasaran kinerja yang ditetapkan seluruhnya dapat dicapai dengan kategori sangat berhasil. Pencapaian sasaran tersebut merupakan komitmen dari seluruh komponen Dinas Sosial Kabupaten Katingan dalam memberikan pelayanan yang berkontribusi tercapainya tujuan Dinas Sosial Kabupaten Katingan secara keseluruhan.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial merupakan bagian penting yang berisi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja, mengatasi kendala, dan meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang. RTL disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan, termasuk analisis capaian indikator kinerja,

identifikasi masalah, dan rekomendasi perbaikan. Berikut adalah Rencana Tindak Lanjut Dinas Sosial Kabupaten Katingan :

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial dengan Melakukan pelatihan bagi petugas pelayanan sosial untuk meningkatkan kompetensi.
- b. Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial dengan cara memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan sosial (PBI, PKH, BST) untuk memastikan tepat sasaran.
- c. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor dengan cara koordinasi intensif dengan instansi terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, LSM, dll.) untuk sinergi program.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur

Lampiran 2. Pohon Kinerja

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja

Lampiran 5. Matrik Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP

Lampiran 6. Penghargaan yang diterima.